

**PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR DAN KABUPATEN  
OGAN KOMERING ILIR DALAM PELAKSANAAN  
OTONOMI DAERAH**



**Skripsi Oleh:**

**MASITA UTAMI**

**01071003076**

**Akuntansi**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih*

*Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**2014**

S  
657.455981607

P.26520/27081

Mas 661 27

P  
2014

**PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR DAN KABUPATEN  
OGAN KOMERING ILIR DALAM PELAKSANAAN  
OTONOMI DAERAH**



**Skripsi Oleh:**

**MASITA UTAMI**

**01071003076**

**Akuntansi**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih*

*Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**2014**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF**

PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR DAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Disusun oleh:

Nama : Masita Utami  
NIM : 01071003076  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal :

Ketua

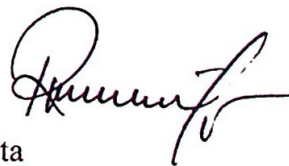


Drs. Burhanuddin, M. Acc, Ak, CA

NIP 195808281988101001

Tanggal :

Anggota



Hj. Rochmawati Daud, SE. M.Si, Ak, CA

NIP 196409031994032001

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR DAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Disusun Oleh:

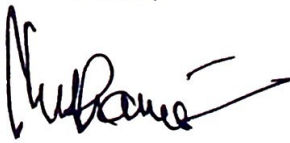
Nama Mahasiswa : Masita Utami  
NIM : 01071003076  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian/ Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 14 Juni 2014 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Palembang, 14 Juni 2014

Ketua,



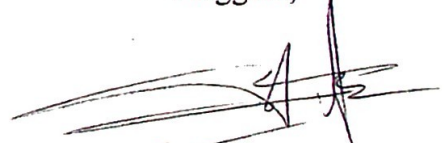
Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak, CA  
NIP 195808281988101001

Anggota,



Dr. Inten Meutia, SE, M.Acc, Ak, CA  
NIP 196905261994032002

Anggota,



Aryanto, SE, M.TI, Ak  
NIP 197408142001121003

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA  
NIP. 196508161995121001

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Masita Utami  
NIM : 01071003076  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul : Perbandingan Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pembimbing :

Ketua : Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak, CA  
Anggota : Hj. Rochmawati Daud, SE., M.Si., Ak, CA  
Tanggal Ujian : 14 Juni 2014

adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan ini Saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabutpredikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Inderalaya, 14 Juni 2014

Pembuat Pernyataan,

  
METERAI  
TEMPEL  
FAKES PEMERINTAH RI  
TGL. 20  
3CC0BABF647518573  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000 DJP  
Masita Utami

NIM 01071003076

## *MOTTO & PERSEMBAHAN*

*“dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila dirinya tertimpa musibah, mereka mengucapkan: inna lillahi wa innaa ilaihi raaji’uun”*

*(Q.S. Al-Baqarah: 155-156 )*

*Skripsi ini dipersembahkan untuk:*

- ❖ Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan keberhasilanku*
- ❖ Adik-adikku yang selalu memberikan semangat*
- ❖ Sahabat dan teman-temanku*
- ❖ Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **Perbandingan Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam Pelaksanaan Otonomi daerah**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana perbandingan kinerja keuangan antara kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten OKI pada tahun anggaran 2008-2009 dengan menghitung rasio keuangan daerah masing-masing kabupaten tersebut. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis ini tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Drs. Burhanuddin, M. Acc., Ak, CA dan Ibu Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si, Ak, CA yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Ketua Jurusan Akuntansi, Bapak Ahmad Subeki, SE, MM., AK, CA
3. Sekretaris Jurusan Akuntansi, Bapak Mukhtaruddin, SE. M.Si, Ak, CA
4. Para dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran
5. Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan OKI
6. Staf Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. Kedua orang tuaku, Bapak Nazaruddin dan Ibu Erma Kaswati serta keluargaku yang tidak pernah henti-hentinya memberikan dukungan secara moriil dan materiil, serta memberikan semangat dan doa
8. Para guruku mulai dari jenjang SD hingga SMA, semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
9. Sahabat-sahabat terbaikku, Upik, Ririn, Intan, Putri, Septi, Santi

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang juga telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Inderalaya, Juni 2014

Masita Utami



## ABSTRAK

### PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR DAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Oleh:

Masita Utami

Pemekaran Kabupaten OKI menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten OKI. Pemekaran ini dikukuhkan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003. Tujuan pemekaran mempersingkat rentang kendali (*span of control*) pemerintah, sehingga azas efektivitas dan efisiensi pelaksanaan bidang pemerintahan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai perbandingan kinerja daerah Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten OKI pada tahun 2008–2011, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan kinerja daerah pemerintah kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten OKI.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian dan keefektifitasan keuangan Pemerintah Kabupaten OKI lebih baik dibanding Ogan Ilir. Namun kedua kabupaten tersebut sama-sama dituntut untuk meningkatkan prestasi kerjanya dengan meningkatkan target PAD yang ingin dicapai.

Kata Kunci: *Kinerja Daerah, Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, PAD.*

Ketua



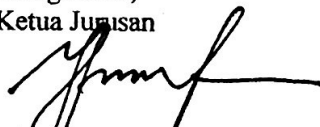
Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak, CA  
NIP 195808281988101001

Anggota



Hj. Rochmawati Daud, SE, M.Si, Ak, CA  
NIP 196409031994032001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA  
NIP 196508161995121001

## ABSTRACT

### *Analysis Comparative of Regency Work on Government of Ogan Ilir and OKI during Law of Regional Autonomy*

By:

Masita Utami; Drs. Burhanuddin, M. Acc., Ak, CA

Rochmawati Daud, S.E., M.Si, Ak

*Regency propagation of OKI become two regencies, are Ogan Ilir and OKI. These propagation was installed by come out the regulation number 37 in year 2003. The purpose of the propagation are for shorten the goverment span of control, basic efectivity and efficiency of sector implementation government.*

*The purpose of this research is for the comparison of the region work of regency Ogan Ilir and OKI period 2008 – 2011 and for identification factors which made the different of region work the government regency of Ogan Ilir and OKI.*

*The result of this research is efectivity and finance autonomy ratio government regency of OKI is better than Ogan Ilir but both of OKI and Ogan Ilir must be better and gain its performances, which is gain its Own-Source Revenue.*

*Key Words: Region Work, Autonomy, Efectivity, Efficiency, Own-Source Revenue.*

Chairman



Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak, CA  
NIP 195808281988101001

Member



Hj. Rochmawati Daud, SE. M.Si, Ak,CA  
NIP 196409031994032001

To be aware,  
Head of Accounting Departement



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA  
NIP 196508161995121001

## SURAT PERNYATAAN

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dari mahasiswa:

Nama : Masita Utami

NIM : 01071003076

Jurusan : Akuntansi

Judul Skripsi : Perbandingan Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

telah kami periksa cara penulisan *grammar*, maupun susunan *tenses*nya dan kami setuju untuk diletakkan pada lembar abstrak.

Palembang, Juni 2014

Pembimbing Skripsi

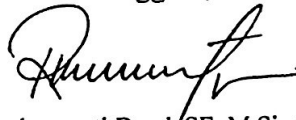
Ketua,



Drs. Burhanuddin, M.Acc. Ak. CA

NIP 195808201988101001

Anggota,

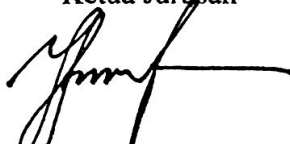


Hj. Rochmawati Daud, SE, M.Si, Ak. CA

NIP 196409031994032001

Mengetahui,

Ketua Jurusan



Ahmad Subeki, SE, M.M. Ak. CA

NIP.196712101994021001

## RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Masita Utami  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal lahir : Kr. Jiwa/29 September 1989  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat Rumah (Orangtua) : Jl. Pagargunung-Baturaja, Desa Jiwa Baru, Kec: Lubai,  
Kab: Muara Enim  
Alamat Email : masitamie@gmail.com

### Pendidikan Formal:

Sekolah Dasar : SDN No. 200 Lubai  
SLTP : SLTP Negeri 1 Lubai  
SMU : SMA Negeri 3 Prabumulih

Pendidikan Non Formal : -

Pengalaman organisasi : -

Penghargaan Prestasi : -

DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK (BAHASA INDONESIA DAN INGGRIS) .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Landasan Teori	
2.1.1 Otonomi Daerah .....	10
2.1.2 Kinerja Keuangan .....	12
2.1.3 Konsep Analisis Rasio Keuangan .....	16
2.2 Penelitian Terdahulu .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1 Ruang Lingkup Penelitian .....	23
3.2 Rancangan Penelitian.....	23
3.3 Sumber Data .....	23
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	24
3.5 Teknik Analisis Data .....	25

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
4.1 Analisis Kinerja Daerah pada Kabupaten Ogan Ilir dan OKI .....	29
4.1.1 Kabupaten Ogan Ilir .....	29
A. Analisis Rasio Kemandirian Kabupaten Ogan Ilir.....	29
B. Analisis Rasio Efektifitas dan Efisiensi Kabupaten Ogan Ilir...32	
C. Analisis Rasio Keserasian Kabupaten Ogan Ilir.....	37
D. Analisis DSCR Kabupaten Ogan Ilir.....	41
E. Analisis Rasio Pertumbuhan Kabupaten Ogan Ilir.....	44
4.1.2 Kabupaten OKI.....	46
A. Analisis Rasio Kemandirian Kabupaten OKI.....	46
B. Analisis Rasio Efektifitas dan Efisiensi Kabupaten OKI.....	48
C. Analisis Rasio Keserasian Kabupaten OKI.....	53
D. Analisis DSCR Kabupaten OKI.....	57
E. Analisis Rasio Pertumbuhan Kabupaten OKI.....	58
4.2. Analisis Perbandingan Kinerja Daerah dengan menggunakan Analisis Trend .....	60
4.2.1 Analisis Trend Rasio Kemandirian.....	61
4.2.2 Analisis trend rasio efektifitas dan efisiensi pendapatan asli daerah.....	63
4.2.3 Analisis Trend Rasio Keserasian.....	67
4.2.4 Analisis Trend DSCR.....	69
4.2.5 Analisis trend rasio Pertumbuhan.....	71
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>77</b>
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Ogan Ilir	
Tahun Anggaran 2008-2011 .....	30
Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Efektifitas Kabupaten Ogan Ilir	
Tahun Anggaran 2008 -2011 .....	33
Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Efisiensi Kabupaten Ogan Ilir	
Tahun Anggaran 2008- 2011 .....	36
Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Belanja Rutin Kabupaten Ogan Ilir	
Tahun Anggaran 2008-2011 .....	39
Tabel 4.5 Perhitungan Rasio Belanja Pembangunan Kabupaten Ogan Ilir	
Tahun Anggaran 2008-2011 .....	39
Tabel 4.6 Perhitungan Rasio Keserasian Kabupaten Ogan Ilir	
Tahun Anggaran 2008-2011 .....	41
Tabel 4.7 Perhitungan Rasio DSCR Kabupaten Ogan Ilir Tahun	
Anggaran 2008-2011 .....	42
Tabel 4.8 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Kabupaten Ogan Ilir	
Tahun Anggaran 2008-2011 .....	44
Tabel 4.9 Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten OKI	
Tahun Anggaran 2008-2011 .....	46
Tabel 4.10 Perhitungan Rasio Efektifitas Kabupaten OKI	

Tahun Anggaran 2008 -2011 .....	49
Tabel 4.11 Perhitungan Rasio Efisiensi Kabupaten OKI	
Tahun Anggaran 2008- 2011 .....	51
Tabel 4.12 Perhitungan Rasio Belanja Rutin Kabupaten OKI Tahun	
Anggaran 2006-2009 .....	54
Tabel 4.13 Perhitungan Rasio Belanja Pembangunan Kabupaten OKI	
Tahun Anggaran 2008-2011 .....	55
Tabel 4.14 Perhitungan Rasio Keserasian Kabupaten OKI	
Tahun Anggaran 2008-2011 .....	55
Tabel 4.15 Perhitungan Rasio DSCR Kabupaten OKI Tahun	
Anggaran 2008-2011 .....	57
Tabel 4.16 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Kabupaten OKI	
Tahun Anggaran 2008-2011 .....	59
Tabel 4.17 Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Ogan Ilir dan OKI	
Tahun Anggaran 2008-2011 .....	61
Tabel 4.18 Perhitungan Rasio Efektivitas Kabupaten Ogan Ilir dan OKI	
Tahun Anggaran 2008-2011 .....	63
Tabel 4.19 Perhitungan Rasio Keserasian Kabupaten Ogan Ilir dan OKI	
Tahun Anggaran 2008-2011 .....	67



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Analisis Trend Rasio Kemandirian Kabupaten Ogan Ilir dan OKI .....	61
Gambar 4.2 Analisis Trend Rasio Efektifitas Kabupaten Ogan Ilir dan OKI .....	64
Gambar 4.3 Analisis Trend Rasio Efisiensi Kabupaten Ogan Ilir dan OKI .....	66
Gambar 4.4 Analisis Trend Rasio Keserasian Kabupaten Ogan Ilir dan OKI ...	68
Gambar 4.5 Analisis Trend Rasio DSCR Kabupaten Ogan Ilir dan OKI .....	69
Gambar 4.6 Analisis Trend Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten Ogan Ilir dan OKI .....	71
Gambar 4.7 Analisis Trend Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir dan OKI .....	72
Gambar 4.8 Analisis Trend Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin Kabupaten Ogan Ilir dan OKI .....	74
Gambar 4.9 Analisis Trend Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan Kabupaten Ogan Ilir dan OKI .....	75

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Ringkasan Laporan APBD kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2008 .....	82
Lampiran 2 Ringkasan Laporan APBD kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2009.....	89
Lampiran 3 Ringkasan Laporan APBD kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2010 .....	91
Lampiran 4 Ringkasan Laporan APBD kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2011 .....	93
Lampiran 5 Ringkasan Laporan APBD kabupaten OKI Tahun Anggaran 2008 .....	95
Lampiran 6 Ringkasan Laporan APBD kabupaten OKI Tahun Anggaran 2009 .....	97
Lampiran 7 Ringkasan Laporan APBD kabupaten OKI Tahun Anggaran 2010 .....	99
Lampiran 8 Ringkasan Laporan APBD kabupaten OKI Tahun Anggaran 2011 .....	101

# BAB I

## PENDAHULUAN



### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999), sistem pemerintahan Republik Indonesia saat ini telah mengalami peralihan dari sentralisasi menjadi desentralisasi, dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai perwujudan otonomi daerah. Secara teoritis, desentralisasi ini diharapkan mampu menghasilkan dua manfaat nyata yaitu: pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap (Mardiasmo, 2005: 25). Selain itu juga dikeluarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 (sebagai pengganti Undang-Undang No. 25 tahun 1999) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang diharapkan lebih mendukung pemberdayaan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan di daerah.

Lebih lanjut Mardiasmo (2000:35) menyatakan bahwa pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan yang mendasar dalam sistem pemerintahan yang ada. Salah satu perubahan mendasar tersebut adalah penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan dalam pengambilan keputusan secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Dengan adanya otonomi daerah kabupaten dan kota maka pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah itu sendiri.

Otonomi daerah memiliki implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang harus berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Perubahan paradigma ini membawa konsekuensi bagi pemerintah. Di antara perubahan yang harus dilakukan adalah pendekatan dalam penganggaran (Yuwono dkk, 2005: 58). Dalam pengelolaan keuangan daerah juga harus mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas dan value for money.

Untuk mengetahui kesiapan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah, maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam era otonomi daerah. Dalam mengukur suatu kinerja, perlu diketahui juga indikator-indikator kinerja sebagai penilaian kinerja dan adanya indikator kinerja agar dapat membantu pemerintah dalam proses pengambilan keputusan anggaran serta mengawasi kinerja anggaran pemerintah. Transparansi yang sangat diperlukan oleh publik adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah

daerah. Sedangkan akuntabilitas menjadi sangat penting karena akuntabilitas merupakan salah satu elemen manajemen keuangan pemerintah untuk menyertai kebijakan pengelolaan keuangan disamping konsep Value For Money, kejujuran, transparansi, dan pengendalian.

Halim (2001:167) menyatakan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi adalah memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan meminimalisasi ketergantungan kepada bantuan pusat agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar. Kuncoro (2002) menjelaskan beberapa penghambat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi, yaitu : dominannya transfer dari pusat, kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber PAD, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, hanya sedikit pajak daerah yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan, kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efisien dan efektif, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan

pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Seperti yang telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya bahwa APBD merupakan tolak ukur keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, serta merupakan ukuran kinerja dari satuan kerja Pemerintah Daerah tersebut, yang dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara efektif, efisien, dan ekonomis. Dalam mengelola keuangan daerah dapat digunakan alat penilaian berupa analisis rasio keuangan APBD yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh daerah suatu periode terhadap periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Tujuan pemekaran mempersingkat rentang kendali (*span of control*) pemerintah, sehingga azas efektifitas dan efisiensi pelaksanaan bidang pemerintahan dapat terwujud. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai pelayanan dalam rangka otonomi daerah secara nyata, luas, dinamis, dan bertanggung jawab. Meningkatkan efektifitas eksploitasi dan pendayagunaan sumber daya alam yang terkandung di daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Mempercepat penyebaran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan sehingga akan dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang merata. Memperkokoh sistem pertahanan keamanan wilayah yang merupakan bagian integral dari sistem pertahanan dan keamanan nasional.

Pemekaran Kabupaten OKI menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten OKI dan Kabupaten Ogan Ilir didukung oleh Keputusan DPRD Provinsi SumSel Nomor 12 tanggal 11 September 2002 tentang Dukungan dan Persetujuan Terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan dan Keputusan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12 tanggal 2 September 2002 tentang Persetujuan Atas Usul Pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Untuk Pembentukan Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan sebagai Daerah Otonom.

Kabupaten OI sebagai kabupaten baru juga dituntut untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, yang terlihat dari kemampuan keuangan, yang berkaitan dengan perwujudan masyarakat adil dan makmur, juga mencakup pemerataan pembangunan dalam segala aspek kehidupan, baik moril maupun materiil, melalui kebijakan penetapan APBD tersebut, sehingga dapat dilihat perbandingan kinerja pemerintah daerahnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andariko pada tahun 2010 dengan objek kabupaten OKU, OKU Selatan, dan OKU Timur diketahui bahwa tingkat kemandirian, efektivitas, serta efisiensi ketiga kabupaten ini masih rendah. Puspanita juga melakukan penelitian pada ketiga kabupaten ini pada tahun 2010 namun dari segi efektivitas, efisiensi, dan ekonomis saja. Berdasarkan penelitian Puspanita diketahui bahwa kinerja ketiga kabupaten ini cukup ekonomis, namun tidak efektif dan tidak efisien. Penulis juga akan melakukan penelitian yang sama yaitu menilai kinerja keuangan, tetapi objek yang akan diteliti adalah kabupaten OKI dan Ogan Ilir.

Dari uraian yang telah disebutkan sebelumnya, maka skripsi ini diberi judul **“Perbandingan Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut maka yang menjadi masalah yang ingin penulis jawab yaitu mengenai:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten OKI dan Ogan Ilir dilihat dari analisis rasio keuangan APBD Tahun Anggaran 2008 – 2011?
2. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan daerah Kabupaten OKI dan Ogan Ilir pada tahun 2008 – 2011?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menilai kinerja keuangan Kabupaten OKI dan Ogan Ilir pada tahun 2008 – 2011.
2. Menilai perbandingan kinerja keuangan daerah Kabupaten OKI dan Ogan Ilir pada tahun 2008 – 2011.



#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah:

1) Manfaat Bagi penulis

Penulis dapat memberikan pengalaman baru, pengetahuan, serta aplikasi langsung di dalam memahami tentang APBD dalam menilai kinerja Pemerintah Daerah pada pemerintah Kabupaten, serta sebagai hasil karya penulisan dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Sriwijaya.

2) Manfaat Bagi Pemerintah Daerah

dapat digunakan untuk bahan evaluasi dan peningkatan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten OKI dan Ogan Ilir di masa mendatang.

3) Manfaat Bagi Pembaca atau Masyarakat

- Untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai penilaian kinerja keuangan pada pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, khususnya bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian dengan fokus kajian penilaian kinerja keuangan pada pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

## **1.5 Sistematika Skripsi**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penulisan skripsi ini, maka pembahasannya disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, landasan teori, lokasi dan jadwal waktu penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan landasan teori sebagai dasar pembahasan tentang konsep Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, konsep Anggaran, Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Konsep Rasio Keuangan, Penelitian terdahulu.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan penjelasan mengenai apa saja yang menjadi ruang lingkup penelitian, rancangan penelitian, sumber data, populasi dan sampel, serta teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan dari pokok permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, berisikan penjabaran analisis dan pembahasan secara

terstruktur mengenai kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten OI dan kabupaten OKI dalam pelaksanaan otonomi daerah jika dilihat dari APBD.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berupa kesimpulan yang berasal dari analisa yang telah dilakukan, kemudian mencoba untuk memberikan masukan yang berupa saran yang dianggap perlu, dan mungkin bermanfaat di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE, UGM.
- Buku Perhitungan APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2008-2011. Tentang Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2008-2011. Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir bagian keuangan. Indralaya.
- Buku Perhitungan APBD Kabupaten OKI Tahun 2008. Tentang Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2008. Pemerintah Daerah Kabupaten OKI bagian keuangan. Kayuagung.
- Daud. M, Rulfah & Abrar Amri. 2008. "Pengaruh Intellectual Capital dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan". *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. Vol 1 No.2. Juli:213-231.
- Dinas Pendapatan Daerah, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKI. Tentang Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2009-2011. Kayuagung.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2008. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Edisi 1. Cetakan ke tujuh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hariadi, Pramono dkk, 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajat. 2002. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mahsun, Mohammad. 2006 . *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Penerbit BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2000. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Nordiawan, Deddy. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59. 2007. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prastowo, Dwi dan Rifka Juliaty .2002. *Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi*. Cetakan kedua (Edisi Revisi). Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN

Program Studi Sarjana Ekonomi. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Fakultas Ekonomi*. Universitas Sriwijaya. Palembang.

Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Subkhan & Dyah Pitaloka Citraningrum. 2010. "Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan di BEI Periode 2005-2007". *Jurnal Dinamika Akuntansi*. Vol 2 No.1. Maret:48-59.

Subramanyam, K.R & John J. Wild. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Financial Statement Analysis*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2007, *Metode Penelitian Bisnis*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Widjaja, HAW. 2009. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.